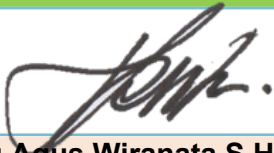


POKOK BAHASAN

FORUM GROUP DISCUSSION PENYAMAAN PERSEPSI
BERSAMA FORKOPIMDA KABUPATEN PROBOLINGGO

HARI / TANGGAL RAPAT	Selasa, 14 April 2026			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Sidang Kartika Pengadilan Negeri Kraksaan			☐	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	10:00 WIB	SELESAI	12:00 WIB	☐	INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	FORUM GROUP DISCUSSION PENYAMAAN PERSEPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP, UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG KUHP, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN PIDANA BERSAMA FORKOPIMDA KABUPATEN PROBOLINGGO			Beri Tanda berikut	☐
PIMPINAN RAPAT	1	Putu Agus Wiranata,S.H.,M.H.			
NOTULIS	2	Elvita Fitrianti Rohma, S.H.			

PIMPINAN RAPAT



Putu Agus Wiranata,S.H.,M.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

JL. PANGLIMA SUDIRMAN NOMOR : 05, KRAKSAAN - Kab. PROBOLINGGO
website : www.pn-kraksaan.go.id , e-mail : info@pn-kraksaan.com

DAFTAR HADIR

FGD PENYAMAAN PERSEPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KUHP, UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG KUHP, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENYESUAIAN PIDANA

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN	
1.	MASHIH	Polri	1	
2.	DJ. SETYO-SH	POLRI	2	
3.	Indung B	polri	3	
4.	Koong	polri	4	
5.	HARI	Polri	5	
6.	FARID	polri	6	
7.	Karwan S.N	polri	7	
8.	Hendro	Polres	8	
9.	Agung dw	-	9	
10.	APRI	polsek	10	
11.	Faisal Akr	kepm	11	
12.	Pulu Agus Partha W.	Kejari	12	
13.	Bobi Ardirizka W.	Kejari	13	
14.	Rizky Aulia P.	Kejari	14	
15.	militan dityo	kejari	15	
16.	KUSUMA HADI	-	16	
17.	anme	polsek	17	
18.	AUTONKO	Kanit Maituh	18	
19.	Dadang H	Kanit Dringu	19	
20.	MARE KEMBAR	Kasat Beskum	20	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

JL. PANGLIMA SUDIRMAN NOMOR : 05, KRAKSAAN – Kab. PROBOLINGGO
website : www.pn-kraksaan.go.id , e-mail : info@pn-kraksaan.com

21.	SAFIK	Kst lantos	21	
22.	Munir	Kot Kurlahan	22	
23.	Tungka	cejak san	23	
24.	Kutn Gdg W.4. War Hu	Itahian	24	
25.	Doci Silulehi	Flalin	25	
26.	Budi Swandiono	sekretaris	26	
27.	Kuyenan Sudarsana	Pamitera	27	
28.	Pa-yanka	Panna Pidu	28	
29.	Nanang Hidayat	hesuccan	29	
30.	M. Endang Han S	Kasubbay umum.	30	
31.			31	
32.			32	
33.			33	
34.			34	
35.			35	
36.			35	
37.			37	
38.			38	
39.			39	
40.			40	
41.			41	
42.			42	
43.			43	
44.			44	

Kraksaan, 14 April 2026.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN**

JL. PANGLIMA SUDIRMAN NOMOR : 05, KRAKSAAN – Kab. PROBOLINGGO
website : www.pn-kraksaan.go.id , e-mail : info@pn-kraksaan.com

NOTULA

**FORUM GROUP DISCUSSION PENYAMAAN PERSEPSI BERSAMA FORKOPIMDA
KABUPATEN PROBOLINGGO**

Dasar : FORUM GROUP DISCUSSION PENYAMAAN PERSEPSI
BERSAMA FORKOPIMDA KABUPATEN PROBOLINGGO

Hari/Tanggal : Selasa, 14 April 2026

Pukul : 10:00 WIB s.d. 12:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Kartika Pengadilan Negeri Kraksaan

Acara : **FORUM GROUP DISCUSSION PENYAMAAN PERSEPSI TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP, UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 2025 TENTANG KUHP, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
PENYESUAIAN PIDANA BERSAMA FORKOPIMDA KABUPATEN PROBOLINGGO**

Jalannya Rapat :

Dalam Acara Rapat ini dipimpin oleh Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., Rapat dihadiri seluruh undangan terlampir sesuai daftar hadir.

Acara Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat dengan diawali mengingatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Kuhp, Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana. Dilanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Rapat Membahas hal-hal sebagai berikut :

Pembahasan Materi Utama dan Dinamika Forum

Memasuki sesi pemaparan materi dan diskusi, forum secara mendalam mengupas tiga regulasi baru yang saling berkaitan. Pembahasan pertama berfokus pada **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**, di mana forum menyepakati adanya pergeseran paradigma hukum yang fundamental, dari yang semula bersifat retributif (pembalasan) menjadi keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Aparat Penegak Hukum (APH) yang hadir memberikan perhatian khusus pada penerapan alternatif sanksi non-pemencaran, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, guna mengatasi masalah kelebihan muatan (*overcrowding*) di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, poin krusial mengenai pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) memicu diskusi hangat; forum sepakat bahwa hukum adat di wilayah Probolinggo harus diidentifikasi secara cermat agar penerapannya di lapangan dapat berjalan harmonis dan tidak berbenturan dengan hak asasi manusia.

Selanjutnya, pembahasan beralih pada **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang KUHP** yang menjadi panduan hukum acara baru. Dalam sesi ini, perwakilan dari Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Probolinggo menyatukan pemahaman mengenai modernisasi penyidikan yang berbasis digitalisasi berkas perkara (*e-berkas*). Dinamika diskusi menyoroti pengetatan syarat-syarat materiil dan formil terkait upaya paksa, seperti penahanan dan penggeledahan, demi menjamin hak-hak tersangka secara lebih akuntabel. Forum juga merumuskan standardisasi formal mengenai mekanisme *Restorative Justice* (keadilan restoratif) di tingkat pra-ajudikasi, sehingga terdapat garis pembatas yang jelas



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN**

JL. PANGLIMA SUDIRMAN NOMOR : 05, KRAKSAAN – Kab. PROBOLINGGO
website : www.pn-kraksaan.go.id , e-mail : info@pn-kraksaan.com

mengenai perkara apa saja yang layak dihentikan demi hukum dan perkara mana yang wajib diteruskan ke meja hijau berdasarkan asas kepastian hukum.

Materi terakhir yang dibedah adalah **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana**. Bagian Hukum Setda Kabupaten Probolinggo bersama para pimpinan lembaga hukum menggarisbawahi bahwa undang-undang ini berfungsi sebagai jembatan sinkronisasi untuk mengharmonisasikan seluruh undang-undang sektoral dan Peraturan Daerah (Perda) lama agar selaras dengan sistem kodifikasi KUHP baru, khususnya terkait besaran indeksasi denda dan jenis sanksi pidana administratif. Forum menyadari bahwa banyak Perda Kabupaten Probolinggo yang memuat ancaman pidana kurungan atau denda yang kini sudah usang dan tidak sinkron dengan ketentuan nasional, sehingga diperlukan langkah cepat untuk melakukan peninjauan kembali secara menyeluruh.

Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut

Sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian FGD, Forum Forkopimda Kabupaten Probolinggo menyatakan sepakat bulat bahwa keberhasilan implementasi hukum pidana baru ini sangat bergantung pada sinergi yang solid antar-instansi serta kesiapan regulasi pendukung di tingkat lokal. Sebagai langkah konkret pasca-FGD, disepakati Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang terdiri dari tiga poin utama.

- *Pertama*, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Hukum Terpadu yang melibatkan unsur penyidik Polres, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri, dan Hakim Pengadilan Negeri guna mengawal masa transisi berkas perkara dan penyamaan teknis operasional di lapangan.
- *Kedua*, Bagian Hukum Setda Kabupaten Probolinggo diinstruksikan untuk segera melakukan inventarisasi dan *review* terhadap seluruh Perda yang memuat sanksi pidana agar dapat diajukan revisinya ke DPRD pada masa sidang berikutnya demi menyesuaikan diri dengan UU No. 1 Tahun 2026.
- *Ketiga*, Forkopimda berkomitmen menggerakkan jajaran di tingkat Kecamatan hingga Pemerintahan Desa untuk melakukan sosialisasi masif dan edukasi publik secara preventif agar masyarakat luas memahami hak dan kewajibannya dalam koridor hukum yang baru.

Penutup

- Rapat ditutup oleh Moderator sebagai Pimpinan Rapat.

Notulis

Elvita Fitrianti Rohma, S.H.

Mengetahui,
Pimpinan Rapat

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN**

JL. PANGLIMA SUDIRMAN NOMOR : 05, KRAKSAAN – Kab. PROBOLINGGO
website : www.pn-kraksaan.go.id , e-mail : info@pn-kraksaan.com

DOKUMENTASI

FORUM GROUP DISCUSSION

Kamis , 14 April 2026

